



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	9
1.4 Landasan Hukum	10
1.5 Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Perencanaan Kinerja	17
2.3 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	93
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	93
3.2 Analisis Capaian Kinerja	93
3.3 Realisasi Anggaran	159
BAB IV PENUTUP	162
4.1 Kesimpulan	162
4.2 Saran	163

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja Renstra Sekretariat Daerah	15
Tabel 2.2	Target Kinerja Tujuan, Sasaran Renja Tahun 2021 P	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021	20
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021	23
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kerja	93
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2021	96
Tabel 3.3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021	100
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Akhir Tahun 2023	105
Tabel 3.5	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan Standar Nasional	108
Tabel 3.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2021 Setda Provinsi Jawa Tengah	109
Tabel 3.7	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun	116
Tabel 3.8	Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	122
Tabel 3.9	Rincian Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	2
--	---

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018–2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Hal tersebut memberikan bukti bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Semarang,

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

Asisten Administrasi

u.b.

Kepala Biro Administrasi

Pembangunan Daerah



ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA

Pembina Tingkat I

NIP. 19710909 199603 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Sehubungan hal tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya memegang prinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka melalui Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditetapkan Tujuan “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah” sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program dan kegiatan Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah. Selanjutnya dirumuskan tiga Sasaran, yaitu: 1). Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah; 2). Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 3). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka pada laporan ini akan menyajikan uraian hasil kinerja tiga indikator tujuan dan dua puluh sembilan indikator sasaran.

Laporan kinerja disusun sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Penyajian pelaporan kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing indikator kinerja. Tingkat capaian tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan peningkatan pencapaian kinerja.

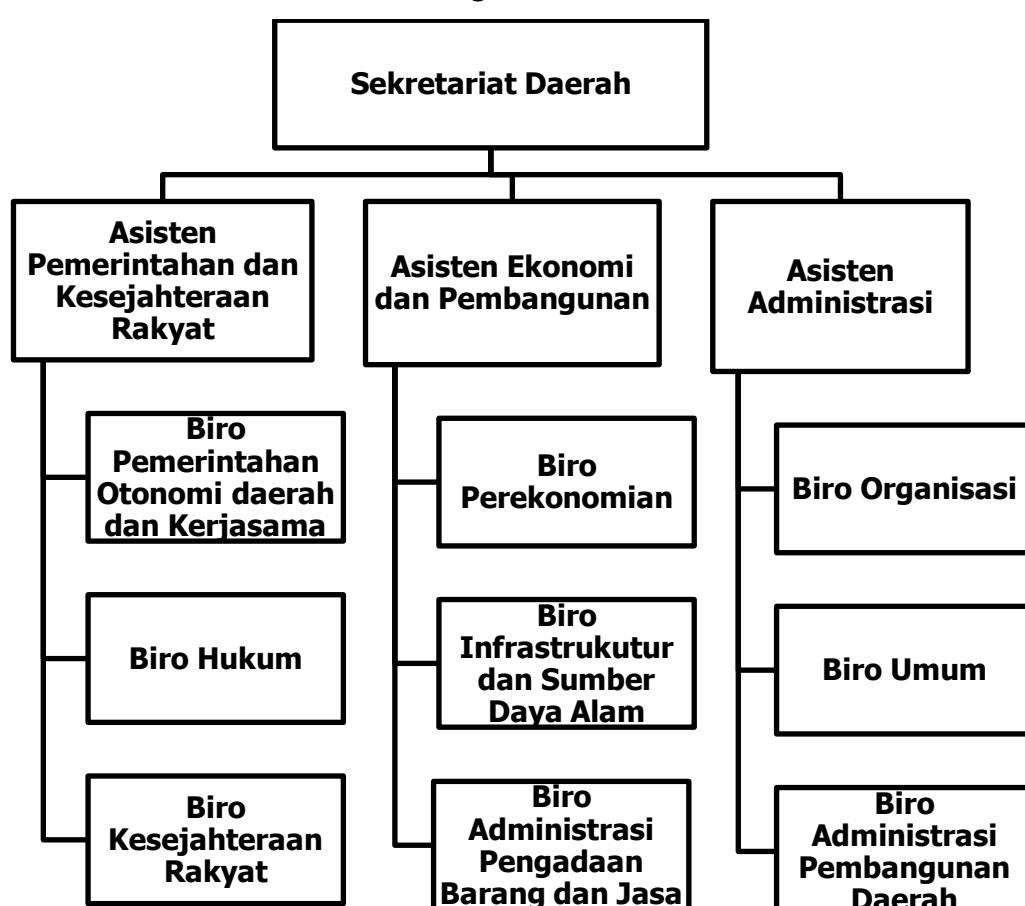
2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

a. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan pada tahun 2018 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai penyesuaian atas pelaksanaan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, urusan pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya diampu oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah, selanjutnya dilaksanakan oleh organisasi baru yaitu Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di bawah Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Berikut merupakan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

b. Kedudukan Sekretariat Daerah

- 1). Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

2). Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

c. Tugas Sekretariat Daerah

Tugas Sekretariat Daerah membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif.

d. Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Fungsi Sekretariat Daerah antara lain:

- 1). Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- 2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubemur;
- 5). Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur, sesuai tugas dan fungsinya.

1). Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, membawahkan:

a). Bagian Pemerintahan, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
- (2). Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan
- (3). Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah
- (4). Sub Bagian Tata Usaha Biro

b). Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal
- (2). Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah

- (3). Sub Bagian Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c). Bagian Kerjasama, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri
 - (2). Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri
 - (3). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemrintahan dan Kesejahteraan rakyat
- 2). Biro Hukum
 - Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan dokumentasi serta informasi hukum, membawahkan:
 - a). Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
 - (2). Sub Bagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur
 - (3). Sub Bagian Pengkajian Dan Sosialisasi Produk Hukum bagian
 - b). Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Sengketa Hukum dan HAM
 - (2). Sub Bagian Bantuan Hukum
 - (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
 - c). Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I
 - (2). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II
 - (3). Sub Bagian Dokumentansi dan Informasi Hukum
 - 3). Biro Kesejahteraan Rakyat
 - Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan

wewenang Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:

a). Bagian Keagamaan, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Pelayanan Kehidupan Beragama
- (2). Sub Bagian Sarana Pendidikan Keagamaan
- (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro

b). Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan
- (2). Sub Bagian Kesehatan
- (3). Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja Transmigrasi

c). Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- (2). Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
- (3). Sub Bagian Kepemudaan dan Olahraga

4). Biro Perekonomian

Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata. membawahkan:

a). Bagian Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan
- (2). Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
 - b). Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan
 - (2). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan
 - c). Bagian Perhubungan Penanaman Modal dan Pariwisata, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Perhubungan
 - (2). Sub Bagian Penanaman Modal dan Pariwisata
- 5). Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
- Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian. membawahkan:
- a). Bagian Infrastruktur, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
 - (2). Sub bagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 - (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
 - b). Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - (2). Sub bagian Energi dan Sumber Daya Mineral
 - (3). Sub bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - c). Bagian Ketahanan pangan, kelautan, Perikanan dan Pertanian, membawahkan:
 - (1). Sub Bagian Ketahanan Pangan
 - (2). Sub Bagian Kelautan dan Perikanan
 - (3). Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
- 6). Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi pengadaan barang/jasa, membawahkan:

- a). Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa
 - (2). Sub bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
 - (3). Sub bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- b). Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
 - (2). Sub bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik
- c). Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - (2). Sub bagian Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - (3). Sub bagian Tata Usaha Biro

7). Biro Organisasi

Biro Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi membawahkan:

- a). Bagian Kelembagaan, membawahkan:

- (1). Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
 - (2). Sub Bagian pembinaan dan pengawasan Kelembagaan kabupaten/Kota
 - (3). Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
 - (4). Sub Bagian Tata usaha Asisten Administrasi
- b). Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik, membawahkan:
- (1). Sub Bagian Tata Laksana
 - (2). Sub Bagian Pelayanan Publik
 - (3). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- c). Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
- (1). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
 - (2). Sub Bagian Reformasi Birokrasi
 - (3). Sub Bagian Kepegawaian
- 8). Biro Umum
- Biro Umum mempunyai tugas menyusun pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga SETDA, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan membawahkan:
- a). Bagian Rumah Tangga Setda, membawahkan:
- (1). Sub Bagian Sarana dan Prasarana
 - (2). Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga
 - (3). Sub Bagian Keuangan
 - (4). Sub Bagian Tata Usaha Biro
- b). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
- (1). Sub Bagian Liputan dan Dokumentasi
 - (2). Sub Bagian Publikasi dan Hubungan Media
 - (3). Sub Bagian Protokol
- c). Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan, membawahkan:
- (1). Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Gubernur
 - (2). Sub Bagian Tata dan rumah Tangga Wakil Gubernur
 - (3). Sub Bagian Materi Naskah Pimpinan
 - (4). Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah

9). Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas, melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubemur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan membawahkan:

- a). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, sosial dan Budaya
 - (2). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi
 - (3). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur
- b). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I
 - (2). Sub bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II
 - (3). Sub bagian Tata Usaha Biro
- c). Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
 - (1). Sub bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - (2). Sub bagian Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - (3). Sub bagian Penyusunan Program

1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1. Aspek Strategis

Aspek strategis merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Sekretaris Daerah dengan indikator dan target yang terukur. Dengan demikian aspek tersebut dijabarkan melalui Sasaran Strategis Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya sinergitas kebijakan daerah, memiliki 7 indikator kinerja sasaran

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki 21 indikator kinerja sasaran

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan administasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan sekretariat daerah, memiliki 1 indikator kinerja sasaran.

2. Permasalahan Utama

Permasalahan Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Formulasi kebijakan pembangunan daerah harus mensinergikan berbagai isu kebijakan pusat, kabupaten/kota dan berbagai situasi yang dinamis.
- b. Efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh transformasi budaya kerja menuju birokrasi yang lebih *agile* (lincah).
- c. Tuntutan pelayanan publik terhadap berbagai jenis layanan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Guna menjawab kebutuhan tersebut, dilakukan survei kepuasan publik secara periodik dan terintegrasi.

1.4 Landasan Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
- i. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2019 dan tahun 2020;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis

Guna mewujudkan visi-misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023, diperlukan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya melalui pengoordinasian pelaksanaan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut merupakan instrumen pengendalian atas upaya pencapaian target-target pembangunan, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

1. Visi-Misi

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berperan penting dalam mewujudkan efektivitas manajemen pemerintahan daerah menuju Visi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari

"Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapus"

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan *guyub* untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah mendukung pencapaian visi-misi dari Kepala Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai kordinator kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah mendukung perwujudan melaksanakan reformasi birokrasi yang mampu merespon, memfasilitasi, dan memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota guna meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat Daerah mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

2. Tujuan

Guna mewujudkan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, melalui Renstra 2018-2023 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan tujuan sebagai pedoman arah gerak operasional pelaksanaan program kegiatan Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah, yaitu:

"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah"

Secara teknokrasi selanjutnya dirumuskan tiga Sasaran untuk mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Sepanjang tahun 2021, di Jawa Tengah menerapkan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengendalian pandemi covid-19 secara ketat melalui PPKM level. Oleh karena itu pada tahun 2021, dilaksanakan kebijakan

refocusing anggaran kegiatan sebanyak 2 kali pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan kondisi pandemi tersebut. Selain itu, dilakukan penyesuaian atau perubahan arah kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2021 agar dapat beradaptasi dengan dinamika daerah, nasional dan global terhadap dampak Covid-19.

Berikut target kinerja sasaran dari tahun 2019 - 2023 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018 - 2023:

Tabel 2.1.
Target Kinerja Renstra Sekretariat Daerah

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah						
	Persentase Kebijakan yang Efektif	80	80	81	83	84
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	75	81	83	84
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	76	76	78	79
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah						
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	85	85	85	85
	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	85	85	85	85
	Persentase kerjasama dalam negeri & luarnegeri yang efektif	70	70	80	85	90
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	80	85	85	85
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealiasi	90	93	91	93	94
	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	90	93	92	93	94
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81	87	92	93	94

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80	75	83	84	85
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80	82	82	84	85
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80	81	82	83	84
	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	90	90	91	93	94
	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	90	90	91	93	94
	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	90	90	91	93	94
	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	19	29	22	28	31
	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,10	70,00	64.32	89	100
	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73	78	78	87	92
	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	25	50	40	70	85
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80	70	84	92	96
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	82	85	85	85	85
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85	70	89	93	95
	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60	30	65	67	70
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85	71	85	85	85
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80	70	84	92	96

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Indikator pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	80	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	80	85	85	85
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	80	100	100	100
	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	100	100
	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah						
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokol dan Kehumasan	75	76	77	78	79

2.2 Perencanaan Kinerja

Guna mewujudkan target kinerja tujuan dan sasaran tersebut, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 merencanakan pelaksanaan 4 program, yaitu:

- Sasaran Pertama, Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah akan diwujudkan melalui dua program, yaitu: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian Pembangunan.
- Sasaran Kedua, Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan diwujudkan melalui tiga program, yaitu: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian Pembangunan, Program Penataan Administrasi Umum.
- Sasaran Ketiga, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah akan diwujudkan melalui satu program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Berikut rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Target Kinerja Tujuan, Sasaran Renja Tahun 2021 Perubahan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah			
		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	82
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	82
		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	77
1.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah			
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	85
		Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	85
		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	80
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	85
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	90
		Persentase usulan rekomendasi kebijakan bid hukum yang terealisasi	%	92
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	92
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
		Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	83
		Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	83
		Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	82
		Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	92
		peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	92
		Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	92

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Nilai Kematangan Organisasi Daerah	%	25
		presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	76,48
		Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	82
		Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	54
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	88
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	85
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	90
		Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	65
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	88
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	85
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	100
		Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah			
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	77

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan memberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 telah melakukan penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Gubernur untuk mewujudkan target kinerja tahun 2021 sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 seperti pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2021**

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	1. Persentase Kebijakan yang Efektif	82
		2. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	82
		3. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	77
2.	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	1. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85
		2. Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85
		3. Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	80

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
		(3)	
(1)	(2)		(4)
		4. Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan 5. Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi 6. Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi 7. Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	85 90 92 92
3.	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah 2. Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota 3. Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan 4. Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah Kabupaten/Kota 5. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan 6. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum 7. Nilai Kematangan Organisasi Daerah 8. Presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik 9. Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B 10. Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat indeks RB nya 11. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 12. Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat 13. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian 14. Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 15. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi 16. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi 17. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya 18. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi 19. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi 20. Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota 21. Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	83 83 82 92 92 92 25 76,48 82 54 88 85 90 65 85 88 100 85 100 100 100
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi	1. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	77

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah		

Pada Tahun 2021, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 4 program, 151 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 644.790.076.000 (Enam ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta tujuh puluh enam ribu Rupiah) untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan. Program dan Anggaran digunakan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran, sedangkan rincian program dan kegiatan seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							350.000.000	204.003.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Adm. Pengadaan Barang /Jasa		%	100	100			
	Administrasi Umum						350.000.000	204.003.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah		Bulan	12	12			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	12	300.000.000	135.367.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	20.000.000	18.636.000	
		Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa		Bulan	12	12			
			Penyediaan Makanan dan Minuman		12	12	30.000.000	50.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							502.112.000	365.719.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker		%	100	100			
	Administrasi Umum						502.112.000	365.719.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		Bulan	12	12			
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12	12	460.112.000	335.304.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	27.000.000	17.415.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		Bulan	12	12			
			Penyediaan Makanan dan Minuman		12	12	15.000.000	13.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							670.000.000	424.959.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DAERAH									
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda		%	100	100			
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah		%	85	85			
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						255.000.000	132.000.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda		Dokumen	1	1			
			Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		1	1	155.000.000	102.000.000	
		Jumlah laporan evaluasi Setda		Dokumen	1	1			
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1	1	100.000.000	30.000.000	
	Administrasi Umum						415.000.000	292.959.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah		Bulan	12	12			
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12	12	314.000.000	200.000.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	21.000.000	12.959.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah		Bulan	12	12			
			Penyediaan Makanan dan Minuman		12	12	80.000.000	80.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							985.000.000	460.348.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda		%	100	100			
	Administrasi Umum						985.000.000	460.348.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam		Bulan	12	12			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12	12	810.000.000	396.598.000	
		Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	120.000.000	41.125.000	
		Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan		Bulan	12	12			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sumber Daya Alam							
			Penyediaan Makanan dan Minuman		12	12	55.000.000	22.625.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							415.000.000	383.532.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat		%	100	100			
	Administrasi Umum						415.000.000	383.532.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat		Bulan	12	12			
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12	12	270.000.000	252.272.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9.000.000	3.000.000	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor				66.000.000	84.990.000	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000	10.000.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat		Bulan	12	12			
			Penyediaan Makanan dan Minuman		12	12	60.000.000	33.270.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							911.775.000	383.076.000	Biro Organisasi
		Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian		%	100	100			
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan		%	100	100			
	Administrasi Umum						467.289.000	199.628.000	Biro Organisasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		Bulan	12	12			
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12	12	320.758.000	127.042.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah		Bulan	12	12			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor		12	12	94.171.000	51.211.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah		Bulan	12	12			
			Penyediaan Makanan dan Minuman		12	12	52.360.000	21.375.000	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						444.486.000	183.448.000	Biro Organisasi
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar		Orang	40	20			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pendidikan dan Pelatihan Formal			40	20	168.872.000	73.421.000	
		Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya		Bulan	12	12			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			12	12	275.614.000	110.027.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							138.428.688.000	113.926.476.000	Biro Umum
	Administrasi Keuangan						99.027.004.000	80.258.160.000	Biro Umum
		Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)		Laporan	12	12			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	12	99.027.004.000	80.258.160.000	
			Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi		12	12			
			Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		1	1			
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan		3	3			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tanggapan Pemeriksaan							
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		12	12				
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran		2	2				
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1	1				
	Administrasi Umum						39.311.684.000	33.578.316.000	Biro Umum
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah		Bulan	12	12			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			12	12	42.000.000	10.500.000	
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran		Bulan	12	12			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		12	12	261.000.000	100.251.000		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10	10	161.000.000	74.400.000		
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah		Bulan	12	12				
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		12	12	27.000.000	19.900.000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		12	12	455.000.000	341.333.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	12	140.000.000	95.750.000		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12	12	116.000.000	186.000.000		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		12	0	-	-		

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			12	12	200.000.000	191.425.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas			12	0	-	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			12	12	641.000.000	680.000.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			12	12	37.000.000	91.190.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran		Bulan	12	12			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12	12	11.330.000.000	10.138.307.000	
		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			12	12	150.000.000	150.000.000	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			12	12	4.500.000.000	4.204.500.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12	9.500.000.000	5.315.451.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		Bulan	12	12			
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12	12	1.000.000.000	370.000.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	84.000.000	49.873.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan		12	12	300.000.000	260.000.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional							
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			12	0	216.000.000	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			12	12	952.000.000	778.230.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor		Bulan	12	12			
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			12	12	677.000.000	691.646.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			12	12	127.000.000	31.750.000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			12	12	2.376.504.000	2.432.478.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah		Bulan	12	12			
		Penyediaan Makanan dan Minuman			12	12	2.320.000.000	2.206.387.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		12	12	338.000.000	179.967.000	
		Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)		Laporan	12	12			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			12	1.197.500.000	970.475.000	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan		Unit	5	0	-	-	
			Pengadaan Mobil Jabatan		5	0	-	-	
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		5	0	-	-	
		Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor		Paket	10	20			
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		10	0	-	-	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		10	0	-	-	
			Pengadaan Peralatan Rumah		10	3	218.000.000	479.917.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jabatan/Dinas							
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			10	13	1.545.680.000	2.914.241.000	
		Pengadaan Mebeleur			10	4	400.000.000	614.345.000	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						90.000.000	90.000.000	Biro Umum
		Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan		Set	900	22			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			50	18	50.000.000	50.000.000	
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			0	0	-	-	
		Pengadaan Pakaian Korpri			800	0	-	-	
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			120	4	40.000.000	40.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							245.000.000	93.122.000	Biro Hukum

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum		%	100	100			
	Administrasi Umum						245.000.000	93.122.000	Biro Hukum
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum		Bulan	12	12			
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12	12	195.000.000	73.867.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Biro Hukum		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	25.000.000	12.465.000	
		Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum		Bulan	12	12			
			Penyediaan Makanan dan Minuman		12	12	25.000.000	6.790.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							258.000.000	103.558.000	Biro Perekonomian Daerah
		Percentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian		%	100	100			
	Administrasi Umum						258.000.000	103.558.000	Biro Perekonomian Daerah
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian		Bulan	12	12			
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12	12	210.000.000	88.058.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian		Bulan	12	12			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	28.000.000	10.500.000	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan		Bulan	12	12			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian							
		Penyediaan Makanan dan Minuman			0		20.000.000	5.000.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							5.697.888.000	3.169.672.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
		Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD		%	100	100			
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan		%	100	100			
		Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti		%	100	100			
		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah		%	100	100			
		Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah		%	100	100			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase tertib administrasi pemerintahan		%	100	100			
	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah						5.697.888.000	3.169.672.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
		Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun		Dokumen	1	1			
			Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah		1	1	39.777.000	23.609.000	
		Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH		Dokumen	21	21			
			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		21	21	1.336.233.000	592.212.000	
		Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/konflik pertanahan		Laporan	1	1			
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		1	1	334.088.000	238.506.000	
		Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD		Dokumen	20	20			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			20	20	82.767.000	60.344.000	
		Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota		Dokumen	0	0	-	-	
		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			0	0	-	-	
		Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota		Dokumen	13	13			
		Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			13	13	518.000.000	319.090.000	
		Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan		Dokumen	1	1			
		Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah			1	1	44.071.000	16.786.000	
		Jumlah dokumen penegasan batas daerah		Dokumen	1	1			
		Pengelolaan Administrasi			2	2	445.152.000	227.275.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah							
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri		Dokumen	1	1			
		Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah			1	1	548.125.000	275.619.000	
		Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri		Dokumen	1	1			
		Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah			1	1	598.214.000	289.018.000	
		Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK		Wilayah	36	36			
		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			36	36	37.948.000	3.507.000	
		Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK		Wilayah	36	36			
		Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			36	36	34.574.000	29.499.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM		Wilayah	36	36			
			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		36	36	257.478.000	184.704.000	
		Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		Laporan	1	1			
			Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah		1	1	234.000.000	285.559.000	
		Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa		Laporan	1	1			
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		1	1	2.800.000	264.000	
		Jumlah naskah kerjasama dalam negeri		Dokumen	25	25			
			Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah		30	30	485.448.000	316.981.000	
			Fasilitasi Kerjasama Badan		20	20	170.000.000	49.548.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Usaha/Swasta							
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1				
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		1	1	50.000.000	26.273.000		
		Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	%	100	100				
		Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah		100	100	479.213.000	230.878.000		
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							390.739.100.000	387.450.252.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	100	100				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	%	100	100				

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		%	100	100			
		Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya		%	90	90			
		Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya		%	90	90			
		Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya		%	90	90			
		Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah		%	100	100			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		%	90	90			
		Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		%	90	90			
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat						390.739.100.000	387.450.252.000	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga		Dokumen	1	1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		1	1	100.000.000	85.060.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan		Dokumen	1	1			
		Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan			1	1	135.000.000	66.150.000	
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil		Dokumen	1	1			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			1	1	90.000.000	43.804.000	
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Dokumen	1	1			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			1	1	90.000.000	61.777.000	
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan		Laporan	1	1			
		Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan			1	1	175.000.000	83.007.000	
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Dokumen	1	1			
		Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial			1	1	100.000.000	48.920.000	
		Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan		Dokumen	4	4			
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			2	2	200.000.000	77.136.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			2	2	190.000.000	116.032.000	
		Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga		Dokumen	1	1			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			1	1	200.000.000	73.917.000	
		Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan		Dokumen	1	1			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			1	1	400.000.000	196.000.000	
		Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil		Dokumen	1	1			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan			1	1	405.000.000	223.746.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rakyat Non Pelayanan Dasar							
		Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Dokumen	1	1			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			1	1	275.000.000	74.243.000	
		Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan		Dokumen	1	1			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			1	1	325.000.000	172.058.000	
		jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji		Dokumen	1	1			
		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			1	1	800.000.000	6.137.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan		Laporan	1	1			
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		1	1	1.780.000.000	1.069.693.000	
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama		Dokumen	2	2			
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		1	1	19.533.000.000	19.533.000.000	
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		1	1	365.211.100.000	365.167.470.000	
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga		Dokumen	1	1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		1	1	80.000.000	26.919.000	
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan		Dokumen	1	1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi		1	1	80.000.000	39.200.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar							
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Dokumen	1	1				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		1	1	80.000.000	39.200.000		
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	1				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		1	1	80.000.000	56.674.000		

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan		Dokumen	1	1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		1	1	80.000.000	28.673.000	
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Dokumen	1	1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		1	1	80.000.000	16.627.000	
		Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Dokumen	1	1			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		1	1	250.000.000	144.809.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							3.995.000.000	2.403.585.000	Biro Hukum
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum		%	92	92			
		Persentase efektifitas produk hukum daerah		%	93	93			
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM		%	92	92			
		Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun		%	92	92			
		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji		%	92	92			
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan		%	93	93			
	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah						3.995.000.000	2.403.585.000	Biro Hukum
		Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM		Kabupaten/Kota	35	35			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			35	35	193.994.000	113.294.000	
		Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK		Laporan	1	0	-	-	
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			1	0	-	-	
		Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu		Perkara	200	200			
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			200	200	485.856.000	320.931.000	
		Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN		Perkara	9	10			
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			9	10	496.644.000	378.398.000	
		Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah		Raperda	15	12			
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			15	12	600.000.000	252.188.000	
		Jumlah produk hukum yang didokumentasi		Dokumen	90	90			
		Pendokumentasian Produk Hukum dan			90	90	215.000.000	161.997.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Naskah Hukum Lainnya							
		Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan		Dokumen	70	70			
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		70	70	115.000.000	11.886.000	
		Jumlah produk hukum yang dikaji		Dokumen	19	22			
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		19	22	294.000.000	229.262.000	
		Jumlah produk hukum yang disosialisasi		Dokumen	4	4			
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		4	4	111.000.000	10.192.000	
		Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah		Dokumen	350	350			
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		350	350	500.000.000	308.407.000	
		Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji		Dokumen	128	128			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota		128	128		300.000.000	150.096.000	
		Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	Dokumen	132	132				
		Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota		132	132		350.000.000	221.226.000	
		Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	Buku	150	60				
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		150	60		170.000.000	106.594.000	
		Penanganan sengketa hukum	Sengketa	6	6				
		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		6	6		163.506.000	139.114.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN							4.640.000.000	2.481.272.000	Biro Perekonomian

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata		%	80	80			
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM		%	90	90			
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD		%	88	88			
		Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya		%	93	93			
		Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya		%	90	90			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target		%	75	75			
		Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		%	87	87			
		Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		%	85	85			
		Persentase tingkat kesehatan BUMD		%	70	70			
Pengelolaan Kebijakan Perekonomian							4.640.000.000	2.481.272.000	Biro Perekonomian
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi		Dokumen	2	2			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		2	2	180.000.000	62.379.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan		Dokumen	1	1			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		1	1	227.865.000	172.490.000	
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM		Dokumen	3	1			
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		3	3	221.210.000	120.178.000	
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata		Dokumen	2	2			
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		2	2	120.000.000	59.367.000	
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan		Dokumen	1	1			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			1	1	111.000.000	42.304.000	
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan		Dokumen	1	1			
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			1	1	150.000.000	75.965.000	
		jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi		Dokumen	3	3			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			3	3	174.000.000	87.071.000	
		jumlah laporan monitoring bidang Keuangan		Dokumen	4	4			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik			4	4	240.379.000	67.150.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha							
		jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM		Dokumen	3	1			
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			3	3	325.300.000	90.647.000	
		jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata		Dokumen	2	2			
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			2	2	148.000.000	43.911.000	
		jumlah laporan monitoring bidang perhubungan		Dokumen	1	1			
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			2	2	152.333.000	42.245.000	
		jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan		Dokumen	2	2			
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan			2	2	403.100.000	172.751.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ekonomi Mikro							
		jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT		Dokumen	2	2			
		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			2	2	1.000.000.000	1.000.000.000	
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi		Dokumen	3	2			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			3	2	206.000.000	72.893.000	
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan		Dokumen	5	2			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			5	2	311.756.000	82.352.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM		Dokumen	3	1			
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		3	3	291.510.000	144.851.000	
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata		Dokumen	2	2			
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		2	2	132.000.000	53.517.000	
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan		Dokumen	1	1			
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		3	3	100.000.000	54.974.000	
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan		Dokumen	2	2			
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		2	2	145.547.000	36.227.000	
PROGRAM							3.650.000.000	1.623.000.000	Biro

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN									Administrasi Pembangunan Daerah
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset		%	85	85			
		Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target		%	81	81			
		Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD		%	100	100			
		Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu		%	88	88			
		Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target		%	84	84			
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan		%	100	100			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		fungsinya							
	Evaluasi Administrasi Pembangunan						3.650.000.000	1.623.000.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
		Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur		Dokumen	1	1			
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		1	1	425.000.000	237.338.000	
		Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	1	1			
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		1	1	300.000.000	112.662.000	
		Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD		Laporan	12	12			
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		12	12	200.000.000	141.454.000	
		Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu		Laporan	12	12			
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		12	12	450.000.000	286.546.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset		Laporan	1	1			
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		1	1	100.000.000	12.300.000	
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset		Dokumen	1	1			
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		1	1	125.000.000	27.700.000	
		Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target		%	83	83			
			Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah		83	83	324.673.000	155.178.000	
		Persentase jumlah kegiatan bantuan		%	83	83			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target							
		Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah			83	83	325.327.000	144.822.000	
		Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target		%	84	84			
		Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD			88	88	295.000.000	145.000.000	
		Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target		%	87	87			
		Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD			88	88	295.000.000	85.000.000	
		Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target		%	81	81			
		Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD			88	88	310.000.000	120.000.000	
		Persentase pelaksanaan		%	86	86			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		DAK sesuai target							
		Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN			86	86	500.000.000	155.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN							3.415.000.000	81.343.767.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur		%	100	100			
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian		%	100	100			
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral		%	100	100			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya		%	90	90			
		Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya		%	90	90			
		Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya		%	90	90			
		Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		%	90	90			
		Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		%	90	90			
		Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan		%	90	90			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya							
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian						1.970.000.000	80.743.759.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan		Laporan	1	1			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		1	1	100.000.000	36.183.000	
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral		Laporan	1	2			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		1	1	28.900.000	13.584.000	
			Koordinasi,		1	1	90.170.000	73.888.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air							
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan		Laporan	1	1			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			1	1	102.000.000	53.862.000	
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Laporan	2	2			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			1	1	59.760.000	8.867.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			1	1	23.250.000	6.074.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan		Laporan	2	2			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		2	2	100.000.000	23.050.000	
		jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral		Laporan	2	2			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		2	1	56.000.000	21.489.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		2	1	84.905.000	25.922.000	
		jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan		Laporan	1	1			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,		1	1	106.000.000	35.689.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kehutanan, Kelautan dan Perikanan							
		jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan		Laporan	1	1			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			1	1	150.000.000	24.359.000	
		jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Laporan	4	2			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			2	1	124.790.000	62.409.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			2	1	54.530.000	24.223.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		Laporan	2	1			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		2	1	250.000.000	139.607.000	
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		Dokumen	1	2			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		1	1	25.100.000	7.272.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		1	1	54.925.000	28.845.000	
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan		Dokumen	1	1			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			1	1	82.000.000	22.905.000	
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	1				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			2	1	250.000.000	176.981.000	
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	2				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			1	1	45.450.000	31.904.000	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		1	1		32.220.000	10.418.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pertambangan dan Lingkungan Hidup							
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		Dokumen	2	2			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			2	2	150.000.000	79.916.228.000	
	Evaluasi Administrasi Pembangunan						1.445.000.000	600.008.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Laporan	2	1			
		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			2	1	200.000.000	66.449.000	
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang		Laporan	2	2			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman							
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		2	2	165.000.000	58.795.000	
		jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		Laporan	2	1			
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		2	1	260.000.000	100.490.000	
		jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Laporan	2	2			
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		2	2	200.000.000	86.540.000	
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Dokumen	2	1			
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis		2	1	320.000.000	168.095.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pembangunan Daerah							
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Dokumen	2	1			
		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			2	1	300.000.000	119.639.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN							3.850.000.000	2.171.092.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani		%	76	76			
		Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa		%	76	76			
		Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa		%	92	92			
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah		%	100	100			
	Pengadaan Barang dan						3.850.000.000	2.171.092.000	Biro Administrasi

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jasa								Pengadaan Barang dan Jasa
		Jumlah Dokumen SHB dan ASB		Dokumen	2	1			
			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		2	1	450.000.000	260.235.000	
		Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi		%	100	100			
			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		100	100	400.000.000	225.300.000	
		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa		%	100	100			
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		100	100	1.100.000.000	552.050.000	
		Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa		%	100	100			
			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		100	100	450.000.000	262.114.000	
		Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa		%	100	100			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP							
		Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		100	100		200.000.000	86.920.000	
		Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah		%	72	72			
		Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			72	72	250.000.000	159.034.000	
		Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan		%	100	100			
		Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			100	100	300.000.000	159.099.000	
		Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa		%	100	100			
		Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa			100	100	500.000.000	327.740.000	
		Persentase sistem		%	100	100			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal							
			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		100	100	200.000.000	138.600.000	
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM							4.101.040.000	2.068.150.000	Biro Organisasi
		Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat		%	87	87			
		Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat		%	57	57			
		Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15		%	31	31			
		Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB		%	85	85			
		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan		%	78.59	78.59			
		Persentase OPD yang		%	83	83			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)							
		Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan		%	34.59	34.59			
		presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15		%	51	51			
	Penataan Organisasi						4.101.040.000	2.068.150.000	Biro Organisasi
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB		Kabupaten /Kota	35	35			
			Penataan Analisis Jabatan		35	35	174.795.000	76.805.000	
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan		Kabupaten /Kota	35	35			
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan		35	35	239.800.000	92.234.000	
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB		Kabupaten /Kota	35	35			
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		35	35	352.758.000	157.317.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan		Kabupaten /Kota	35	35			
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		35	35	290.700.000	130.387.000	
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI		Kabupaten /Kota	35	35			
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		35	35	106.025.000	49.994.000	
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP		Kabupaten /Kota	35	35			
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		35	35	232.630.000	57.989.000	
		Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan		Kabupaten /Kota	35	35			
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		35	35	327.165.000	163.555.000	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan		OPD	41	41			
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi		41	41	481.500.000	580.751.000	
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB		OPD	41	41			
			Penataan Analisis Jabatan		41	41	215.500.000	75.234.000	
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB		OPD	41	41			
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		41	41	297.242.000	99.350.000	
			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		41	41	-	-	
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI		OPD	41	41			
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		41	41	106.025.000	38.523.000	
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP		OPD	41	41			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		41	41		232.620.000	64.376.000	
		Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan		Unit	240	240			
		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			240	240	563.600.000	252.466.000	
		Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan		Unit	150	150			
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			100	100	480.680.000	229.169.000	
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM							49.736.393.000	45.734.493.000	Biro Umum
		Persentase layanan liputan dan keprotokolan		%	100	100			
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah		%	100	100			
		Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan		%	100	100			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		%	100	100			
	Pelaksanaan Administrasi Umum						27.843.897.000	26.717.751.000	Biro Umum
		Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)		Bulan	12	12			
			Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur		12	12	25.466.077.000	25.060.879.000	
			Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur		12	12	1.350.000.000	1.209.553.000	
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas		Laporan	1	1			
			Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah		1	1	50.000.000	22.930.000	
		Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah		Laporan	4	4			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah			4	4	30.000.000	9.030.000	
		Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah		Laporan	12	12			
		Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah			12	12	474.000.000	364.136.000	
		Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum		Laporan	2	1			
		Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah			2	1	137.000.000	5.000.000	
		Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah		Laporan	3	3			
		Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah			3	3	336.820.000	46.223.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan						21.892.496.000	19.016.742.000	Biro Umum
		Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan		Laporan	12	12			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET		RUPIAH		UNIT PELAKSANA
					2021	2021 P	APBD MURNI	APBD P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		12	12		1.400.000.000	1.360.722.000	
		Fasilitasi Tamu		12	12		150.000.000	96.000.000	
		Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		12	12		52.000.000	10.000.000	
		Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	Bulan	12	12				
		Dokumentasi Pimpinan		12	12		1.800.000.000	2.189.000.000	
		Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah	Laporan	1200	1200				
		Penyiapan Materi Pimpinan		1200	1200		377.000.000	161.832.000	
		Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	Paket	144	144				
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		144	144		18.113.496.000	15.199.188.000	
Jumlah							612,589,996,000	644.790.076.000	-

Sumber : e-budgeting Provinsi Jawa Tengah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2021 merumuskan 3 (tiga) target kinerja pada level Tujuan dan 29 (dua puluh sembilan) target kinerja pada level sasaran. Seluruh indikator target kinerja tersebut dikelompokkan dalam tiga rumusan kinerja Sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah.

Evaluasi capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) rentang capaian dan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 91 %	Sangat Baik
2.	76 % sampai dengan 99,99 %	Baik
3.	66 % sampai dengan 75,99 %	Cukup
4.	51 % sampai dengan 65,99 %	Kurang
5.	Kurang dari 50,99 %	Sangat Kurang

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut uraian capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021:

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2021

Tujuan Sekretariat Daerah Jawa Tengah tahun 2021 dengan 3 indikator seluruhnya tercapai dalam kategori "sangat baik". Indikator pertama, Persentase Kebijakan yang Efektif dengan capaian sebesar 112,26%. Faktor utama ketercapaian indikator tersebut yaitu adanya peningkatan efektivitas koordinasi dan sinergitas stakeholder terkait dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Jawa Tengah. Indikator kedua, Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 102,16%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari pengawalan kinerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Biro lingkup Setda sebagai korodinator pelaksanaan kebijakan di Jawa Tengah. Indikator

ketiga, Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda dengan capaian sebesar 107,47% menunjukkan adanya kepuasan terhadap pelayanan umum yang diberikan Sekretariat Daerah terhadap pengguna layanan.

Sasaran pertama "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah" dengan 7 indikator, seluruhnya tercapai dalam kategori "sangat baik". Adapun agenda yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain:

- 1). Peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyusunan dan monitoring kebijakan bidang pengendalian administrasi pembangunan daerah, wilayah, pelaporan dan analisis guna mengungkit sinergi kebijakan daerah;
- 2). Peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyusunan dan monitoring kebijakan bidang pemerintahan, dan otonomi daerah; 3). Peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyusunan dan monitoring kebijakan bidang kerjasama dalam dan luar negeri; 4). Peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyusunan dan monitoring kebijakan bidang kesejahteraan rakyat; 5). Peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyusunan dan monitoring kebijakan bidang perekonomian;
- 6). Peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyusunan dan monitoring kebijakan bidang hukum; dan 7). Peningkatan efektivitas koordinasi dalam penyusunan dan monitoring kebijakan bidang infrastruktur dan sumber daya alam.

Sasaran kedua "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" dengan 21 indikator. Sebanyak 20 indikator tercapai dalam kategori "sangat baik" dan 1 indikator dalam kategori "baik". Adapun agenda yang mendukung sasaran strategis tersebut antara lain:

- 1). Peningkatan efektivitas pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah ditengah situasi pandemi Covid-19;
- 2). Optimalisasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota;
- 3). Peningkatan efektivitas pelaporan pelaksanaan APBD dan bantuan keuangan;
- 4). Peningkatan efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota;
- 5). Optimalisasi produk hukum daerah yang diinformasikan;
- 6). Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum;
- 7). Peningkatan nilai kematangan organisasi daerah;
- 8). Peningkatan UPP yang memperoleh nilai IKM baik;
- 9). Pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B;
- 10). Peningkatan Kabupaten/Kota yang meningkat indeks RB nya;
- 11). Optimalisasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan sumber daya alam;
- 12). Optimalisasi

pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat; 13). Optimalisasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang perekonomian; 14). Peningkatan efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; 15). Optimalisasi kinerja perangkat daerah bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, dan aset yang dievaluasi; 16). Optimalisasi perangkat daerah bidang infrastruktur dan sumber daya alam yang dievaluasi; 17). Optimalisasi kinerja perangkat daerah bidang umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya; 18). Optimalisasi kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat yang dievaluasi; 19). Optimalisasi kinerja perangkat daerah bidang perekonomian yang dievaluasi; 20). Peningkatan efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota; 21). Peningkatan tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD.

Sasaran ketiga “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah” dengan 1 indikator yang tercapai dalam kategori “sangat baik”. Adapun agenda yang mendukung sasaran strategis tersebut adalah survei kepuasan publik secara periodik dan terintegrasi untuk mengetahui hal-hal yang perlu adanya perbaikan. Data perbandingan target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 secara lengkap seperti tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2021

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah					
	Persentase Kebijakan yang Efektif	82	92,05	112,26	Sangat Baik
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	82	83,77	102,16	Sangat Baik
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	77	82,75	107,47	Sangat Baik
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah					
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	100	117,65	Sangat Baik
	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	100	117,65	Sangat Baik
	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	80	80	100,00	Sangat Baik
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	87,1	102,47	Sangat Baik
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	90	90,91	101,01	Sangat Baik
	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	92	100	108,70	Sangat Baik
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	92	100	108,70	Sangat Baik
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	83	99,14	119,46	Sangat Baik
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	83	100	120,48	Sangat Baik

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	82	100	121,95	Sangat Baik
	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	92	100	108,70	Sangat Baik
	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	92	100	108,70	Sangat Baik
	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	92	100	108,70	Sangat Baik
	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	25	36,10	144,40	Sangat Baik
	Presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	76,48	100,00	130,75	Sangat Baik
	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	82	91,83	111,99	Sangat Baik
	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	54	88,7	164,26	Sangat Baik
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	88	90	102,27	Sangat Baik
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	87,88	103,39	Sangat Baik
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	90	90	100,00	Sangat Baik
	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	65	67,22	103,42	Sangat Baik
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85	85,71	100,84	Sangat Baik
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	88	87,5	99,43	Sangat Baik
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	100	100,00	Sangat Baik
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	81,25	95,59	Sangat Baik
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	80	80,00	Baik
	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100,00	Sangat Baik

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100,00	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	77	82,75	107,47	Sangat Baik

3.2.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2021 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kinerja Sekretariat Daerah tahun 2019 – 2021 sangat terpengaruh oleh kondisi pandemi covid-19. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja baik pada kinerja Tujuan maupun Sasaran. **Kinerja Tujuan** “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah” yang terdiri dari 3 indikator memiliki capaian rata-rata pada tahun 2019 sebesar 108,36%, tahun 2020 sebesar 106,8% dan tahun 2021 sebesar 107,29%.

Kinerja Sasaran pertama “Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah” yang terdiri dari 7 indikator memiliki capaian rata-rata pada tahun 2019 sebesar 110,85%; tahun 2020 sebesar 108,69% dan tahun 2021 sebesar 108,02%.

Kinerja Sasaran kedua “Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” terdiri dari 21 indikator capaian rata-rata pada tahun 2019 sebesar 115,45%, tahun 2020 sebesar 109,35% dan 2021 sebesar 110,89%. **Kinerja Sasaran ketiga** “Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah” terdiri dari 1 indikator memiliki capaian pada tahun 2019 sebesar 100,84%, tahun 2020 sebesar 101,97% dan tahun 2021 sebesar 107,47%.

Sedangkan **rata-rata capaian** seluruh indikator **kinerja Tujuan** dan **Sasaran** tahun **2019 sebesar 113,32%**, tahun **2020 sebesar 108,74%** dan tahun **2021 sebesar 109,82%**. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2021 meningkat dari tahun 2020, namun belum lebih tinggi dari tahun 2019. Langkah tanggap seluruh perangkat daerah pada tahun 2021 yang semakin baik, berimplikasi pada peningkatan kinerja dari tahun 2020 sekalipun belum mampu mencapai performa kinerja sebelum pandemi covid-19. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019, 2020 dan 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah										
	Persentase Kebijakan yang Efektif	80	93,02	116,28	80	86,08	107,6	82	92,05	112,26
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	86,36	107,95	75	83,13	110,84	82	83,77	102,16
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	75,63	100,84	76	77,5	101,97	77	82,75	107,47
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah										
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	100	117,65	85	100	117,65	85	100	117,65
	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	100	117,65	85	100	117,65	85	100	117,65
	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70	71	101,43	70	70	100,00	80	80	100,00
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	85,71	100,84	80	80,65	100,81	85	87,1	102,47
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealiasi	80	83,05	103,81	80	81,82	102,28	90	90,91	101,01
	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	90	100	111,11	93	100	107,53	92	100	108,70

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	81	100	123,46	87	100	114,94	92	100	108,70
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah										
	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	80	81	101,25	75	99,47	132,63	83	99,14	119,46
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	80	96,6	120,75	82	99	120,73	83	100	120,48
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	80	95,63	119,54	81	85,13	105,10	82	100	121,95
	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	90	100	111,11	91	100	109,89	92	100	108,70
	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	90	100	111,11	91	100	109,89	92	100	108,70
	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	90	100	111,11	91	100	109,89	92	100	108,70
	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	19	24,78	130,42	29	31,84	109,79	25	37,22	148,88
	Presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	52,1	92,63	177,79	70	93,22	133,17	76,48	100,00	130,75
	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	73	75	102,74	78	83,67	107,27	82	91,83	111,99
	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	25	40	160,00	50	68,57	137,14	54	88,7	164,26
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	80	100	125,00	70	70	100,00	88	90	102,27

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	88,46	104,07	70	70	100,00	85	87,88	103,39
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85	87,5	102,94	70	70	100,00	90	90	100,00
	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	60	96,93	161,55	30	32	106,67	65	67,22	103,42
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85	85,71	100,84	71	85,71	120,72	85	85,71	100,84
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	80	75	93,75	70	80	114,29	88	87,5	99,43
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	100	100,00	80	100	125,00	100	100	100,00
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	85,41	100,48	80	83,33	104,16	85	81,25	95,59
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	90	90,00	80	40	50,00	100	80	80,00
	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2019			2020			2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administiasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah										
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	75	75,63	100,84	76	77,5	101,97	77	82,75	107,47

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Akhir Tahun 2023

Tujuan Sekretariat Daerah, **capaian 3 indikator** tahun 2021 terhadap target akhir tahun 2023, **seluruhnya diatas 60%**. Pencapaian kinerja tujuan tersebut sangat ditentukan oleh situasi perencanaan pada suatu tahun, namun demikian dapat diprediksi bahwa target pada akhir tahun 2023 “**akan tercapai**”.

Kinerja Sasaran yang terdiri dari **29 indikator**, capaian tahun 2021 terhadap target akhir 2021 **seluruhnya diatas 60%**. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh target indikator Tujuan dan indikator Sasaran pada tahun 2023 diprediksi **seluruhnya akan tercapai**.

Perbandingan realisasi kinerja hingga tahun 2021 terhadap target akhir tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap
Target Akhir Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	REALISASI 2021	TARGET AKHIR 2023	CAPAIN %	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah					
	Persentase Kebijakan yang Efektif	92,05	82	112,26	Akan Tercapai
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	83,77	82	102,16	Akan Tercapai
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	82,75	77	107,47	Akan Tercapai
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah					
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	100,00	85	117,65	Akan Tercapai
	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	100,00	85	117,65	Akan Tercapai
	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	80,00	90	88,89	Akan Tercapai
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	87,10	85	102,47	Akan Tercapai
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	90,91	96	94,70	Akan Tercapai
	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	100,00	94	106,38	Akan Tercapai
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	100,00	94	106,38	Akan Tercapai
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	99,14	85	116,63	Akan Tercapai
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	100,00	85	117,65	Akan Tercapai
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	100,00	84	119,05	Akan Tercapai

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	REALISASI 2021	TARGET AKHIR 2023	CAPAIN %	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	100,00	94	106,38	Akan Tercapai
	Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	100,00	94	106,38	Akan Tercapai
	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	100,00	94	106,38	Akan Tercapai
	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	37,22	31	120,06	Akan Tercapai
	Presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	100,00	100	100,00	Akan Tercapai
	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	91,83	92	99,82	Akan Tercapai
	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	88,70	85	104,35	Akan Tercapai
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	90,00	96	93,75	Akan Tercapai
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	87,88	85	103,39	Akan Tercapai
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	90,00	95	94,74	Akan Tercapai
	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	67,22	70	96,03	Akan Tercapai
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85,71	85	100,84	Akan Tercapai
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	87,50	96	91,15	Akan Tercapai
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100,00	100	100,00	Akan Tercapai
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	81,25	85	95,59	Akan Tercapai
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	80,00	100	80,00	Akan Tercapai
	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100,00	100	100,00	Akan Tercapai

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	REALISASI 2021	TARGET AKHIR 2023	CAPAIN %	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Percentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100,00	100	100,00	Akan Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administiasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah					
	Percentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	82,75	79	104,75	Akan Tercapai

3.2.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda dirumuskan secara komposit sehingga tidak dapat disandingkan dengan target kinerja nasional.

Tabel 3.5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dengan Standar Nasional

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NIHIL						

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2021 Setda Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 Biro memiliki 3 fungsi yaitu: pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Biro-Biro telah menjalankan fungsi tersebut dengan baik. Hal tersebut dicerminkan oleh kinerja Tujuan dan Sasaran yang tercapai 100% atau lebih, sebanyak 29 indikator (90,63%) dan sebanyak 3 indikator (9,37%) belum tercapai 100%.

Tujuan Sekretariat Jawa Tengah dengan 3 indikator, capaian kinerjanya pada tahun 2021 seluruhnya diatas 100%. Pada level sasaran dengan 29 indikator, sebanyak 26 indikator capaiannya 100% atau lebih, dan 3 indikator belum mencapai target. Hal yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: keberhasilan Biro-Biro bersama SKPD teknis dan stakeholders terkait dalam menyusun rumusan kebijakan yang terlaksana tahun 2021 dan keberhasilan Biro-Biro dalam pengawalan kinerja SKPD teknis guna pencapaian target kinerja tahun 2021. Secara keseluruhan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tahun 2021 Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2021
Setda Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah						
	Persentase Kebijakan yang Efektif	82	92,05	112,26	Biro lingkup Setda bersinergi dengan OPD dan stakeholder terkait dalam menyusun rumusan kebijakan	Untuk menjaga pencapaian kinerja maka Biro-Biro di lingkup Sekretariat Daerah perlu terus melakukan sinergi yang intensif guna perumusan kebijakan pembangunan dengan stakeholder terkait
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	82	83,77	102,16	Biro lingkup Setda melaksanakan koordinasi intensif dalam mengawal kinerja OPD ampuan	Pencapaian kinerja agar tetap terjaga, Biro-Biro di lingkup Sekretariat Daerah perlu terus melakukan koordinasi yang intensif dalam mengawal kinerja OPD ampuan
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	77	82,75	107,47	Biro Umum telah melaksanakan survey IKM secara periodik	Biro-Biro lingkup Setda menjaga dan meningkatkan layanannya agar kepuasaan pengguna layanan Sekretariat Daerah dapat meningkat
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah						
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	100	117,65	Biro Adm. Bangda berhasil merealisasikan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian kegiatan APBD Prov. Jateng berdasarkan agenda/SSK melalui aplikasi e-RKO	Agar kualitas pelaksanaan APBD semakin meningkat, Biro Adm. Bangda melakukan pengawalan agenda yang dilaksanakan oleh OPD secara periodik

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	100	117,65	Biro Pemotdaker mampu bersinergi dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan terkait kerja sama antar daerah yang berkelanjutan sebagai lokomotif pembangunan	Biro Pemotdaker agar memastikan kerja sama yang tejalin dapat memberikan kemanfaatan bersama bagi daerah yang saling bekerjasama
	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	80	80	100,00	-	-
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	87,1	102,47	Biro Kesra mampu bersinergi dengan stakeholder terkait dalam merealisasikan kebijakan bidang kesejahteraan, antara lain membangun desa bersama mahasiswa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera	Biro Kesra perlu melakukan pengawalan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesra agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	90	90,91	101,01	Biro Perekonomian telah bersinergi dengan stakeholder terkait agar inflasi di Jawa Tengah tetap stabil dengan menjaga ketersediaan stok kebutuhan pangan di Jawa Tengah	Biro Perekonomian perlu melakukan upaya-upaya agar kondisi makro Jawa Tengah tetap stabil
	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	92	100	108,70	Biro Hukum berhasil merealisasikan rekomendasi kebijakan bidang hukum dengan direalisasikanya sebanyak 12 Raperda dan 602 Raoergub Jateng	Biro Hukum perlu melakukan sinergi dengan stakeholder terkait agar Perda dan Pergub yang disusun dapat sesuai dengan kaidah yang berlaku
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	92	100	108,70	Biro ISDA berhasil merealisasikan rekomendasi kebijakan, bidang kehutanan terkait reposisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	Biro ISDA perlu terus bersinergi guna memastikan rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap masyarakat

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	83	99,14	119,46	Biro Adm. Bangda berhasil mendorong OPD Jawa tengah agar pelaksanaan APBD berjalan dengan efektif, hal ini terbukti dengan capaian fisik sebesar 99,14% pada tahun 2021	Pemanfaatan aplikasi econtrolling APBD dalam pengendalian pelaksanaan APBD oleh Biro Adm. Bangda
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	83	100	120,48	Biro Adm. Bangda telah berhasil melakukan sinergi dengan stakeholder terkait agar seluruh kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 dapat terlakasana	Pemanfaatan aplikasi Simbangda Bankeu dalam pengendalian bantuan keuangan oleh Biro Adm. Bangda
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	8	100	121,95	Biro Adm. Bangda berhasil mendorong seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD dan Bankeu tepat waktu dan sesuai kaidah	Biro Adm. Bangda terus melakukan fasilitasi, konsultasi dan pendampingan guna pelaporan pelaksanaan APBD dan bantuan keuangan dapat tetap optimal
	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	92	100	108,70	Biro Hukum berhasil mengkaji seluruh rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 agar tersusun rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang sesuai kaidah perundang-undangan	Biro Hukum terus melakukan pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota agar rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang diajukan sesuai kaidah perundang-undangan
	Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	92	100	108,70	Biro Hukum telah mengelola JDIH sebagai sarana penyebarluasan informasi produk hukum daerah serta pengelolaan perpustakaan SETDA	Biro Hukum perlu mempertahankan pengelolaan JDIH dan perpustakaan agar produk-produk hukum dapat terus terpublikasi kepada masyarakat

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	92	100	108,70	Biro Hukum telah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu serta bantuan hukum dalam rangka penanganan sengketa hukum serta perkara perdata/TUN	Biro Hukum agar terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar bantuan hukum yang diberikan dapat berjalan dengan optimal
	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	25	36,10	144,40	Biro Organisasi berhasil mendorong pencapaian kematangan organisasi daerah terutama dengan adanya pencapaian di 6 Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah yang "sangat tinggi"	Biro Organisasi perlu terus melakukan penataan organisasi melalui fasilitasi, evaluasi tugas dan fungsi OPD berdasarkan kewenangan
	Presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	76,48	100,00	130,75	Biro Organisasi berhasil mendorong seluruh UPP di Jawa Tengah sebanyak 198 UPP memperoleh nilai IKM baik	Biro Organisasi dilakukan survey secara elektronik untuk memperoleh nilai IKM seluruh UPP di Jateng
	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	82	91,83	111,99	Biro Organisasi berhasil mendorong sebanyak 45 dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah dalam pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	Biro Organisasi agar terus melakukan pembinaan/ pendapingan secara berkala terhadap OPD Provinsi Jawa Tengah
	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	54	88,7	164,26	Biro Organisasi berhasil mendorong sebanyak 26 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah indeks RB nya meningkat pada tahun 2021	Biro Organisasi agar terus melakukan fasilitasi, Koordinasi dan Monev pelaksanaan RB di Kabupaten/Kota
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	88	90	102,27	Biro ISDA telah berhasil melakukan pengawalan terhadap kebijakan strategis bidang ISDA yaitu pelaksanaan program BLT DBHCHT kepada petani dan buruh rokok di Provinsi Jawa Tengah	Biro ISDA agar terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di Provinsi Jawa Tengah guna pelaksanaan kebijakan strategis bidang ISDA
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	87,88	103,39	Biro ISDA telah berhasil melakukan pengawalan terhadap kebijakan strategis bidang kesra, program penanggulangan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah	Biro Kesra agar terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di Provinsi Jateng guna pelaksanaan kebijakan strategis bidang Kesra

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	90	90	100,00	-	-
	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	65	67,22	103,42	Biro APBJ berhasil mendorong SKPD untuk semakin tertib dalam melaksanakan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai Aturan	Biro APBJ agar melakukan pendampingan dan sosialisasi regulasi terbaru terkait pengadaan barang/Jasa di Provinsi Jawa Tengah
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85	85,71	100,84	Biro Adm. Bangda berhasil mendorong OPD ampuan untuk mencapai target IKU PD nya sebanyak 6 IKU OPD target dari total sebanyak 7 IKU OPD ampuan	Biro Adm Bangda melaksanakan koordinasi intensif dalam mengawal kinerja OPD ampuan
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	88	87,5	99,43	Biro ISDA telah melakukan koordinasi dengan OPD ampuan, namun pada tahun 2021 baru sebanyak 35 IKU OPD ampuan Biro ISDA yang mencapai target, dari total sebanyak 40 IKU OPD ampuan	Biro ISDA perlu meningkatkan koordinasi lebih intensif dalam mengawal kinerja OPD ampuan
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	100	100,00	-	-
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	81,25	95,59	Biro Kesra telah melakukan koordinasi dengan OPD ampuan, namun pada tahun 2021 baru sebanyak 39 IKU OPD ampuan Biro Kesra yang mencapai target, dari 48 IKU OPD ampuan	Biro Kesra perlu meningkatkan koordinasi lebih intensif dalam mengawal kinerja OPD ampuan
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	80	80,00	Biro Perekonomian telah melakukan koordinasi dengan OPD ampuan, namun baru sebanyak 8 IKU OPD ampuan Biro Perekonomian yang mencapai target, dari total sebanyak 10 IKU OPD ampuan	Biro Perekonomian perlu meningkatkan koordinasi lebih intensif dalam mengawal kinerja OPD ampuan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100,00	-	-
	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100,00	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administiasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah						
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	77	82,75	107,47	Biro Umum telah melaksanakan survei IKM secara periodik	Biro Umum agar menjaga dan meningkatkan layanannya agar kepuasaan pengguna layanan Biro Umum dapat meningkat

3.2.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Anggaran Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya pada **tahun 2021** sebanyak **Rp.644.790.076.000,-** dengan **realisasi** sebesar **Rp.588.580.305.652,-** atau **91,28%** terdapat efisiensi sebesar **8,72%**. **Sasaran pertama**, meningkatnya sinergitas kebijakan daerah pada tahun 2021 didukung anggaran sebesar Rp.468.056.444.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.415.440.909.093 atau **88,76%** terdapat efisiensi sebesar **11,24%**. **Sasaran kedua**, meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung anggaran sebesar Rp.60.708.563.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.987.650.191,- atau **97,17%** terdapat efisiensi sebesar **2,83%**. **Sasaran ketiga**, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah didukung anggaran sebesar Rp.116.344.793.000,- dengan realisasi sebesar Rp.114.467.888.177 atau **98,39%** terdapat efisiensi sebesar **1,61%**.

Realisasi anggaran pada sasaran pertama, memiliki efisiensi sebanyak 11,24%. Hal tersebut, salah satunya disebabkan oleh efisiensi kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Jawa Tengah. Secara keseluruhan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			% EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah								
	Persentase Kebijakan yang Efektif	82	92,05	112,26				
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	82	83,77	102,16				
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	77	82,75	107,47				
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah					468.056.444.000	415.440.909.093	88,76	11,24
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	85	100	117,65	27.700.000	25.413.500	91,75	8,25
	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	100	117,65	26.273.000	25.429.841	96,79	3,21
	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	80	80	100,00	1.528.573.000	1.521.103.394	99,51	0,49
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	85	87,1	102,47	384.907.763.000	373.403.419.179	97,01	2,99
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	90	90,91	101,01	444.814.000	423.518.996	95,21	4,79
	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	92	100	108,70	560.595.000	559.857.600	99,87	0,13

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			% EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	92	100	108,70	80.560.726.000	39.482.166.583	49,01	50,99
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					60.708.563.000	58.987.650.191	97,17	2,83
	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	83	95,61	115,19	505.000.000	502.381.530	99,48	0,52
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	83	100	120,48	300.000.000	292.275.794	97,43	2,57
	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	82	100	121,95	778.000.000	766.012.330	98,46	1,54
	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	92	100	108,70	1.323.059.000	1.322.101.200	99,93	0,07
	Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	92	100	108,70	280.477.000	279.885.100	99,79	0,21
	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	92	100	108,70	239.454.000	238.994.800	99,81	0,19
	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	25	36,10	144,40	1.363.410.000	1.074.077.608	78,78	21,22
	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	76,48	100,00	130,75	359.556.000	345.123.000	95,99	4,01
	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	82	91,83	111,99	137.873.000	110.740.500	80,32	19,68
	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	54	88,7	164,26	207.311.000	202.097.859	97,49	2,51

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			% EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	88	90	102,27	520.728.000	478.522.190	91,89	8,11
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	85	87,88	103,39	1.077.941.000	855.817.231	79,39	20,61
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	90	90	100,00	1.349.554.000	1.154.876.567	85,57	14,43
	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	65	67,22	103,42	2.171.092.000	2.024.900.519	93,27	6,73
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	85	85,71	100,84	12.300.000	11.421.500	92,86	7,14
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	88	87,5	99,43	215.508.000	192.992.400	89,55	10,45
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	100	100,00	45.734.493.000	45.330.122.730	99,12	0,88
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	85	81,25	95,59	1.464.548.000	1.241.772.594	84,79	15,21
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	80	80,00	686.904.000	596.176.448	86,79	13,21

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			% EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Percentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	Percentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100,00	791.999.000	786.460.742	99,30	0,70
	Percentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100,00	1.189.356.000	1.180.897.549	99,29	0,71
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah					116.344.793.000	114.467.888.177	98,39	1,61
	Percentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	77	82,75	107,47	116.344.793.000	114.467.888.177	98,39	1,61

3.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Kinerja Tujuan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 3 sasaran strategis, yang disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan program/kegiatan selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja tiap Sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung.

Sasaran pertama "Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah" memiliki rata-rata tingkat capaian sebesar **108,02%**, sedangkan **rata-rata tingkat capaian program** yang mendukung sasaran tersebut sebesar **102,58%**. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat **tingkat kesesuaian** sebesar **105,30%**, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan antara lain pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif.

Sasaran kedua "Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" memiliki rata-rata tingkat capaian sebesar **110,45%**, sedangkan **rata-rata capaian program** yang mendukung sasaran tersebut sebesar **108,94%**. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat **tingkat kesesuaian** sebesar **101,38%**, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan antara lain pada program perekonomian dan pembangunan yang mampu mengawal pencapaian target-target kinerja seluruh urusan pembangunan daerah.

Sasaran ketiga "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah" memiliki tingkat capaian sebesar **100%**, sedangkan **rata-rata capaian program** yang mendukung sasaran tersebut sebesar **100%**. Jika diperbandingkan tingkat capaian sasaran dengan program, maka terdapat **tingkat kesesuaian** sebesar **100%**, yang menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi. Sinergi pelaksanaan program/kegiatan ditunjukkan antara lain pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mampu mewujudkan layanan umum Sekretariat Daerah secara prima. Secara keseluruhan analisis program/kegiatan yang

menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebijakan yang efektif				82	92,05	112,26	
MENINGKATNYA SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi			%	85	100	117,65	
		PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN						
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	%	85	100	117,65	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi			%	85	100	117,65	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
		PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif			%	80	80	100,00	
			Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00	Menunjang
			Persentase ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	Dokumen	25	68	272,00	Menunjang
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan				%	85	87,1	102,47	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
	FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	%	100	100	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealiasi			%	90	90,91	101,01	
		PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN						
		PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN						
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	88	89,47	101,67	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	Dokumen	2	3	150,00	Menunjang
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	90	93,75	104,17	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi			Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	1	2	200,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	%	80	80	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
				%	92	100	108,70	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
	KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH							

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	93	100	107,53	Menunjang
			Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Raperda	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Dokumen	350	602	172,00	Menunjang
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi				%	92	100	108,70	
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN							
	PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN							
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
		EVALUASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah			%	82	83,77	102,16	Menunjang
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota			%	100	100	100,00	Menunjang
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
			Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	100	100	100,00	Menunjang
	PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH							
			Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kinerja Organisasi dan Pelayanan Publik	Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah		Jumlah dokumen penegasan batas daerah	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
	Peningkatan Kapasitas Daerah		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100	100	100,00	
			Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH	Dokumen	21	23	109,52	Menunjang
			Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD	Dokumen	20	37	185,00	Menunjang
	Kinerja Organisasi dan Pelayanan Publik		Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota	Dokumen	0	0		
			Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	Dokumen	13	15	115,38	Menunjang
			Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	Wilayah	36	36	100,00	Menunjang
			Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	Wilayah	36	36	100,00	Menunjang
			Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	Wilayah	36	36	100,00	Menunjang
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi			%	85	81,25	95,59	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
			Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90	90	100,00	Menunjang
	FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
			Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bid Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan& catatan Sipil	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan hasil koordinasi dgn perangkat daerah bid Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90	90	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat				%	85	87,88	103,39	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90	90,91	101,01	Menunjang
			Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	Dokumen	4	4	100,00	Menunjang
			Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90	92,31	102,57	Menunjang
			Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90	91,67	101,86	Menunjang
			Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan			Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang	
			Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%	92	100	108,70		
				%	92	100	108,70	Menunjang	
		KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH	Jumlah produk hukum yang didokumentasi Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	Dokumen	90	90	100,00	Menunjang	
				Dokumen	70	70	100,00	Menunjang	
				Buku	60	60	100,00	Menunjang	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kebijakan dan Produk Hukum Daerah	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum			%	92			
	Persentase efektifitas produk hukum daerah		%	93	100	107,53	Menunjang	
	Jumlah produk hukum yang dikaji		Dokumen	22	22	100,00	Menunjang	
	Jumlah produk hukum yang disosialisasi		Dokumen	4	4	100,00	Menunjang	
	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota			%	92	100	108,70	
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji		%	92	100	108,70	Menunjang	
	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji		Dokumen	128	195	152,34	Menunjang	
	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji		Dokumen	132	169	128,03	Menunjang	
	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum		%	92	100	108,70	Menunjang	
	Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu		Perkara	200	200	100,00	Menunjang	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Percentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi			Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	Perkara	10	15	150,00	Menunjang
			Penanganan sengketa hukum	Sengketa	6	6	100,00	Menunjang
			Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	92	100	108,70	Menunjang
			Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	Kabupaten/Kota	35	35	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	Laporan	0	0		
			Percentase tingkat kesehatan BUMD	%	100	80	80,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN					
			PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN					
			Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Percentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	85	100	117,65	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	87	100	114,94	Menunjang
			Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	75	93,62	124,83	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	3	3	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	Dokumen	4	4	100,00	Menunjang
	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian			%	90	90	100,00	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan			Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90	92,31	102,57	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	1	3	300,00	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	Dokumen	2	2	100,00	Menunjang
			Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	93	93,33	100,35	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN		82	100	121,95	
			EVALUASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase OPD dan Kabupaten/Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD & Bankeu	%	88	90,48	102,82	Menunjang
			Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	Laporan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	Laporan	12	12	100,00	Menunjang
			Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kpd DPRD	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah				%	83	99,14	119,45	
			Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	84	86,39	102,85	Menunjang
			Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	84	75	89,29	Menunjang
			Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	87	74,04	85,10	Menunjang
			Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	81	78,57	97,00	Menunjang
			Persentase pelaksanaan DAK	%	86	70	81,40	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			sesuai target					
	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota			%	83	100	120,48	
			Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	%	81	85,39	105,42	Menunjang
			Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	%	83	97,23	117,14	Menunjang
			Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	%	83	91,52	110,27	Menunjang
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi			%	85	85,71	100,84	
			Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi			%	88	87,5	99,43	
		PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN						
		PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN						
			Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90	100	111,11	Menunjang
			jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Laporan	2	2	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam			Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan & Energi Sumber Daya Mineral yg dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90	100	111,11	Menunjang
			jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	Laporan	2	2	100,00	Menunjang
			jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	2	2	100,00	Menunjang
				%	88	90	102,27	
			Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90	90	100,00	Menunjang
			jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	Laporan	2	2	100,00	Menunjang
			jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	2	2	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90	90	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			EVALUASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
			Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90	90	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	2	2	100,00	Menunjang
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi			%	88	87,5	99,43	
			Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan	%	90	100	111,11	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			fungsinya					
			jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	2	2	100,00	Menunjang
Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa				%	65	67,22	103,42	
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN							
	PENGADAAN BARANG DAN JASA							
			Percentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	92	92	100,00	Menunjang
			Jumlah Dokumen SHB & ASB	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Percentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	100	100	100,00	Menunjang
			Percentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	%	100	100	100,00	Menunjang
			Percentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%	76	76	100,00	Menunjang
			Percentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	%	100	100	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	%	100	100	100,00	Menunjang
			Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	100	100	100,00	Menunjang
			Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	%	72	80	111,11	Menunjang
			Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	%	76	76	100,00	Menunjang
			Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	%	100	100	100,00	Menunjang
			Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	%	100	100	100,00	Menunjang
Nilai Kematangan Organisasi Daerah				Skor	25	37,22	148,88	
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM							
			Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%	85	89,5	105,29	Menunjang
	PENATAAN ORGANISASI							
			Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	Kabupaten/ Kota	35	35	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	OPD	41	41	100,00	Menunjang
			Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	78,59	79,44	101,08	Menunjang
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Kabupaten/ Kota	35	35	100,00	Menunjang
			Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Unit	240	240	100,00	Menunjang
			Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%	83	100	120,48	Menunjang
			Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan SAKIP	Kabupaten/ Kota	35	35	100,00	Menunjang
			Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	OPD	41	41	100,00	Menunjang
			Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	31	52,78	170,26	Menunjang
			Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	Kabupaten/ Kota	35	35	100,00	Menunjang
			presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	51	100	196,08	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	OPD	41	41	100,00	Menunjang
	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B			%	82	91,83	111,99	
			Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%	87	82,5	94,83	Menunjang
			Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	OPD	41	41	100,00	Menunjang
			Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	OPD	41	41	100,00	Menunjang
	Persentase kabupaten/kota yang meningkat indeks RB nya			%	54	88,7	164,26	
			Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%	57	88,57	155,39	Menunjang
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB	Kabupaten/ Kota	35	35	100,00	Menunjang
			Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	Kabupaten/ Kota	35	35	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik			%	76,48	100	130,75	
			Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	34,59	42,66	123,33	Menunjang
			Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	Unit	150	150	100,00	Menunjang
			Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	Kabupaten/ Kota	35	35	100,00	Menunjang
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya			%	100	100	100,00	
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM						
			Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	%	100	100	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Laporan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	3	3	100,00	Menunjang
			Persentase perangkat daerah bidang Umum yg dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas	Laporan	1	1	100,00	Menunjang
			Persentase layanan liputan dan keprotokolan	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	4	4	100,00	Menunjang
			Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah	Laporan	1200	1200	100,00	Menunjang
			Persentase layanan liputan dan keprotokolan	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	Paket	144	144	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	Laporan	12	12	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda			%	77	82,75	107,47	
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN PEMBINAAN ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan			%	100	100	100,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro APBJ	%	100	100	100,00	Menunjang
		ADMINISTRASI UMUM						
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Biro Umum	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Umum	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah Biro Umum	Bulan	12	12	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Organisasi	%	100	100	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100,00	Menunjang
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan SDA	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	Bulan	12	12	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonominan	%	100	100	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Biro Perekonominan	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonominan	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepeg dan keuangan Biro Umum	%	100	100	100,00	Menunjang
			ADMINISTRASI KEUANGAN				100	
			Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Karsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	12	12	100,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	5	0		
			Jumlah unit pengadaan	Paket	10	20	200,00	Menunjang

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	% CAPAIAN	MENUNJANG /TIDAK MENUNJANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			sarana dan prasarana kantor					
		PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					2	
			Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Set	900	22	2,44	Tidak Menunjang
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	40	20	50,00	Tidak Menunjang
			Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaianya	Bulan	12	12	100,00	Menunjang
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
			Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	%	85	85	100,00	Menunjang
		PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
			Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang
			Jumlah laporan evaluasi Setda	Dokumen	1	1	100,00	Menunjang

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2021, didukung APBD sebesar Rp 644.790.076.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) secara ringkas komposi penggunaan sebagai berikut:

- a. Program Perekonomian Pembangunan didukung APBD sebesar Rp.85.448.039.000,- terealisasi sebesar Rp.43.975.391.826,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 51,46%.
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat didukung APBD sebesar Rp.395.194.601.000,- terealisasi sebesar Rp.383.074.863.952,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 96,93%.
- c. Program Penataan Administrasi Umum Rakyat didukung APBD sebesar Rp.47.802.643.000,- terealisasi sebesar Rp.47.062.161.697,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 98,45%
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rakyat didukung APBD sebesar Rp.116.344.793.000,- terealisasi sebesar Rp.114.467.888.177,- sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 98,39%

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci per program adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9.
Rincian Pengeluaran Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	85.448.039.000	43.975.391.826	51,46%
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	2.223.008.000	2.190.184.412	98,52%
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	83.225.031.000	41.785.207.414	50,21%
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	395.194.601.000	383.074.863.952	96,93%
	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan	3.169.672.000	3.148.719.829	99,34%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Otonomi Daerah			
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	387.450.252.000	375.499.971.004	96,92%
	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	2.403.585.000	2.401.272.600	99,90%
	Pengadaan Barang dan Jasa	2.171.092.000	2.024.900.519	93,27%
3	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	47.802.643.000	47.062.161.697	98,45%
	Penataan Organisasi	2.068.150.000	1.732.038.967	83,75%
	Pelaksanaan Administrasi Umum	26.717.751.000	26.637.612.828	99,70%
	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	19.016.742.000	18.692.509.902	98,30%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	116.344.793.000	114.467.888.177	98,39%
	Administrasi Umum	35.681.185.000	34.967.859.039	98,00%
	Administrasi Keuangan	80.258.160.000	79.107.391.453	98,57%
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	273.448.000	270.396.685	98,88%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.000.000	122.241.000	92,61%
Total		644.790.076.000	588.580.305.652	91,28%

BAB IV **PENUTUP**

A. SIMPULAN

1. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 memiliki indikator Tujuan dan Sasaran sebanyak 32 indikator, yang tercapai sebanyak **31 indikator** dalam kategori “**sangat baik**” dan **1 indikator** dalam kategori “**baik**”. Hal yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja, antara lain: pelaksanaan penyusunan kebijakan yang mampu dikoordinasikan secara sinergis dengan *stakeholders* terkait; pengendalian kinerja yang efektif mengawal target-target kinerja perangkat daerah; dan adanya kepuasan pengguna layanan umum Sekretariat Daerah.
2. **Rata-rata** capaian kinerja **Tujuan** dan **Sasaran** tahun **2019** sebesar **100,84%**, tahun **2020** sebesar **101,97%** dan tahun **2021** sebesar **107,47%**. Rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran tahun 2021 **meningkat** dari tahun 2020, namun **belum lebih tinggi** dari tahun 2019. Langkah tanggap seluruh perangkat daerah pada tahun 2021 yang semakin baik berimplikasi pada peningkatan kinerja dari tahun 2020 sekalipun belum mampu mencapai performa kinerja sebelum pandemi covid-19.
3. Seluruh indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2021 memiliki tingkat capaian lebih dari 60% sehingga terhadap **target akhir tahun 2023**, diprediksi seluruhnya **akan tercapai**.
4. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian pencapaian kinerja seluruh urusan pembangunan. Namun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Setda **dirumuskan secara komposit** sehingga **tidak dapat disandingkan** dengan target kinerja nasional.
5. Kinerja **Tujuan** dan **Sasaran** yang tercapai 100% atau lebih adalah sebanyak **29 indikator (90,63%)** dan sebanyak **3 indikator (9,37%)** tidak tercapai 100%. Hal yang **mendukung pencapaian** kinerja antara lain: keberhasilan Biro-Biro bersama SKPD teknis dan *stakeholders* terkait dalam menyusun rumusan kebijakan yang terlaksana tahun 2021 dan keberhasilan Biro-Biro dalam melakukan koordinasi, fasilitasi mengawal kinerja SKPD teknis guna pencapaian target kinerja tahun 2021.
6. **Anggaran** Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak **Rp.644.790.076.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp.588.580.305.652,-** atau

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

91,28% sehingga terdapat efisiensi sebesar **Rp.56.209.770.348,-** atau **8,72%**. Hal tersebut disebabkan adanya sisa penggunaan anggaran pada kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di Jawa Tengah.

7. Kinerja **Tujuan** Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian **3 sasaran strategis**, yang seluruhnya tercapai secara **sinergis** dengan kinerja **program** dan **kegiatan**. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan mampu mewujudkan pelaksanaan formulasi kebijakan yang efektif; Program Perekonomian dan Pembangunan mampu mengawal pencapaian target-target kinerja seluruh urusan pembangunan daerah; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mampu mewujudkan layanan umum Sekretariat Daerah secara prima.

B. SARAN

Terhadap permasalahan diatas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro-Biro melakukan **pemetaan** dan **perumusan kebijakan** pelaksanaan pembangunan yang **mengikuti perkembangan** situasi regional maupun global melalui optimalisasi peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional lainnya di lingkup Setda.
2. Biro-Biro **meningkatkan sinergi dan koaborasi** dengan SKPD teknis dan *stakeholders lainnya* guna memastikan kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan optimal.
3. Biro-Biro **meningkatkan efektifitas koordinasi, fasilitasi** dan **sinkronisasi** agenda biro dengan SKPD teknis guna **menuntaskan target kinerja** indikator daerah dan indikator kinerja utama perangkat daerah **tahun 2023** sebagai akhir RPJMD.
4. Biro-Biro melaksanakan **agenda dan kebijakan** pembangunan yang **bersinergi** dengan agenda dan kebijakan **Pemerintah pusat** yang dilaksanakan **di Provinsi Jawa Tengah**.
5. Biro-Biro **meningkatkan pengendalian** terhadap **kinerja SKPD teknis** melalui **optimalisasi** pemanfaatan *E-Controlling Kinerja* sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.
6. Biro-Biro **mengoptimalkan** pemanfaatan *E-Controlling APBD* sebagai instrumen **pengendalian penggunaan anggaran** agar program dan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

7. Biro-Biro melaksanakan **agenda-agenda** yang mampu **mendukung target kinerja Program** dan **Kegiatan** serta dapat **mengungkit kinerja Tujuan** dan **Sasaran Sekretariat Daerah**.

Dengan demikian perlu perhatian terhadap hal-hal tersebut di atas, dan diharapkan terjadi penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan kualitas capaian hasil kinerja yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah khususnya, serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.